

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan tolok ukur pembangunan nasional. Sektor ekonomi selalu menjadi fokus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kini, setelah masa krisis terlewati, perbaikan sektor ekonomi tetap menjadi prioritas utama. Pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari sektor perbankan. Dunia perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan, maka salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi adalah dengan menata sektor perbankan. Sesuai yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo et al (2000: 7) bahwa “Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai sarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian”. Peningkatan peranan perbankan sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan volume usaha sektor riil. Oleh karenanya kekacauan sistem perbankan akan berdampak luas pada perekonomian negara.

Perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki peranan penting dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keadaan perbankan dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini dapat dipahami sebab tercermin pada fungsi perbankan sebagai penjamin penyelesaian perdagangan, penjamin penyelesaian

proyek, dan terutama sebagai lembaga perantara atau *intermediary* (Malayu S. P. Hasibuan, 2006). Fungsi lembaga perantara atau *intermediary* tersebut yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat di sektor riil dengan bentuk kredit untuk menunjang perekonomian nasional.

Kegiatan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang deregulasi kegiatan perbankan pada tanggal 1 Juni 1983. Dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah yang lebih dikenal dengan Pakto 27 tahun 1988. Kebijakan ini memberi jalan bagi perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dengan memberi kemudahan mendirikan bank dan kewajiban likuiditas minimum bank turun sehingga bank-bank menjamur. Setelah terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 yang mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil, kondisi perekonomian nasional yang juga berdampak pada perbankan telah menunjukkan ke arah yang lebih baik sejak tahun 2000 (Indonesia-online; 2005).

Mulai tahun 2002, secara umum kondisi ekonomi telah membaik dalam hal stabilitas moneter, kendati masih berjalan lambat dari sisi pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah nyata pemerintah untuk mendorong kegiatan perbankan dalam sektor perekonomian nasional adalah dengan cara menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). “Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.” (Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Hal ini dimaksudkan agar suku

bunga kredit ikut turun sehingga perbankan dapat melakukan penyaluran kredit terutama pada sektor riil.

Kegiatan perbankan dimulai dari adanya kepercayaan dari para nasabahnya serta keamanan (*safety*) uang nasabah. Oleh karena itu, bank dituntut untuk selalu dalam posisi siap membayar utangnya apabila para deposan akan menarik dananya. Selain itu, bank sebagai suatu badan usaha yang mencari untung harus dapat memasarkan uangnya semaksimal mungkin agar tidak *idle money* atau kelebihan dana yang menganggur. Kinerja perbankan mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari indikator tentang kinerja bank itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kinerja Perbankan 2005 - Mei 2008**

INDIKATOR	Des	Des	Des	2008				
	2005	2006	2007	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
CAR (%)	19,30	21,27	19,30	21,60	21,00	20,52	19,39	18,26
Modal	144.47	183.391	211.176	232.131	231.295	218.904	225.145	221.329
ATMR	748.541	862.145	1.094.196	1.074.652	1.101.171	1.067.007	1.161.366	1.212.156
ROA (%)	2,55	2,64	2,78	3,16	2,93	2,72	2,56	2,62
Laba (Profit)	30.601	40.555	49.859	61.304	56.913	52.777	49.814	51.008
Rata-rata total aset	1.201.039	1.538.821	1.792.481	1.940.843	1.940.965	1.942.205	1.944.058	1.949.766
BOPO (%) <sup>1</sup>	89,50	86,98	84,05	87,90	85,56	85,19	86,37	85,51
LDR (%)	59,66	61,56	66,32	67,06	67,89	70,66	71,65	72,80
Kredit (Credits)	695.648	792.297	1.002.012	987.404	1.002.724	1.036.065	1.061.770	1.096.214
Dana Pihak Ketiga <sup>2</sup>	1.166.065	1.287.102	1.510.834	1.472.485	1.476.990	1.466.224	1.481.971	1.505.725

Ket : <sup>1</sup> Data revisi bulan Mei, Juni dan Juli 2007

<sup>2</sup> Sampai dengan Desember 2005 menggunakan Dana yang diterima (*Funds Received*)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Vol. 6, No. 6, Mei 2008

Dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.1 bahwa pada tahun 2005 hingga tahun 2007 kinerja sektor perbankan menunjukkan keadaan yang terus membaik, yang tercermin antara lain dari meningkatnya pertumbuhan dana dan kredit perbankan, meningkatnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR), serta meningkatnya *profitabilitas*. Namun, pada awal tahun 2008 kinerja perbankan mengalami penurunan. Walaupun jumlah kredit yang disalurkan dan LDR meningkat beberapa indikator kinerja perbankan mulai menunjukkan perkembangan yang tidak mengembirakan, yang tercermin antara lain menurunnya *profitabilitas*, menurunnya CAR, serta meningkatnya rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO).

‘Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.’ (Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998)

Kelangsungan hidup sebuah bank sangat ditentukan oleh kualitas kredit karena itu berbagai regulasi di bidang perkreditan diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, maupun oleh pihak internal bank dengan tujuan untuk meminimalkan resiko kredit agar kelancaran usaha bank tidak terganggu. Namun permasalahan perbankan khususnya kredit tidak akan pernah hilang. Hal ini terlihat dari banyaknya bank-bank yang menyimpan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan sedikit sekali dalam menyalurkan kredit pada sektor riil. Baiknya kebijakan kredit dan sistematisnya analisis terhadap semua permohonan kredit, tidak dapat menghindarkan kredit itu untuk menjadi macet. Untuk itu perbankan akan bereaksi dengan memperketat pemberian pinjaman dan bahkan dalam mempertimbangkan kredit. Karena perbankan baru saja pulih dari masa

krisis, sehingga untuk menjaga stabilitas moneter, perbankan harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Jumlah kredit yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan bank. Kemampuan bank dapat dilihat melalui tingkat likuiditasnya.

Sebagai pengelola dana masyarakat, tentunya bank mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat baik secara legal maupun moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus memelihara kelangsungan usahanya. Kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di bank, sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperolehnya mengenai kualitas dan kinerja bank yang bersangkutan dengan salah satu indikatornya adalah menilai tingkat kesehatan bank. Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan Tatok Budi Santoso (2006: 22), mendefinisikan kesehatan bank sebagai :

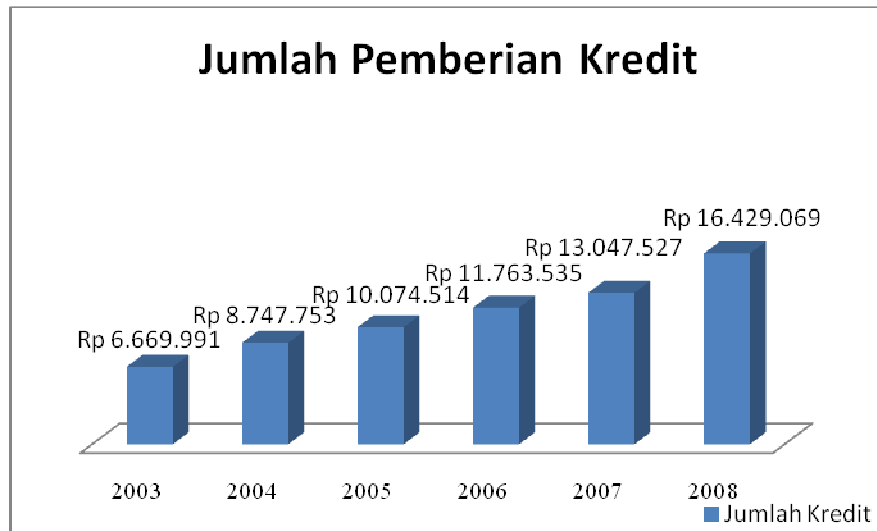
“Kemampuan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.”

Dalam surat edaran BI No. 6/ 23/ DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, ditetapkan ukuran kesehatan bank-bank di Indonesia, yaitu dengan menggunakan CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity*). Dari kelima faktor ukuran penilaian kesehatan bank, keadaan keuangan merupakan faktor yang dianggap paling utama dalam menentukan keadaan bank yang sebenarnya. Keadaan keuangan terdiri dari tiga faktor yaitu: likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Dibandingkan dengan faktor rentabilitas dan solvabilitas, faktor likuiditas mempunyai pengaruh yang lebih cepat menyulitkan bank dalam menyalurkan kredit bila faktor-faktor tersebut mengalami gangguan.

Hal ini dipahami sebab likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena memiliki alat pembayaran yang lebih besar dari utang jangka pendeknya. Suatu bank dengan tingkat likuiditas yang tinggi lebih berpotensi untuk meningkatkan jumlah kredit yang diberikan, dengan resiko kredit macet yang juga semakin besar. Di lain pihak kredit menyerap sebagian terbesar dana yang dikuasai oleh bank, hal ini akan membahayakan likuiditas bank bahwa semakin banyak dana yang disalurkan untuk kredit maka likuiditas bank semakin rendah.

Bank memiliki suatu batasan dalam melakukan pemberian kredit yang dapat ditunjukkan oleh tingkat *Loan to Deposit Ratio*. Hal tersebut dimungkinkan terjadi oleh karena adanya risiko-risiko yang ditanggung oleh perbankan, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko kecukupan modal. Untuk tujuan-tujuan di atas yang akan dicapai oleh masing-masing pihak, para pemakai laporan keuangan perbankan harus dapat mengetahui dengan baik bagaimana mekanisme pemberian kredit maupun pinjaman dalam bentuk selain uang, kemampuan untuk mendapatkan laba usaha, dan tingkat risiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut dengan harapan hasil analisis tersebut dapat memberikan gambaran memadai mengenai bank yang diteliti.

PT. Bank Jabar Banten merupakan bank milik Pemerintah Jawa Barat dan Banten yang kegiatan operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari pemberian kredit kepada nasabah. PT. Bank Jabar Banten melakukan pemberian kredit ke berbagai sektor, baik sektor usaha kecil, menengah, atas, riil dan sektor-sektor lainnya.



Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Jabar Banten

**Gambar 1.1**  
**Grafik Jumlah Pemberian Kredit PT. Bank Jabar Banten**

Untuk lebih jelasnya, penulis sajikan tabel perkembangan pemberian kredit sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pemberian Kredit**  
**Tahun 2003 –2008**

Tahun	Kredit yang diberikan (Rp)	Kenaikan (penurunan) Kredit yang diberikan		
		Rp	%	Keterangan
2003	6.669.991	-	-	-
2004	8.747.753	2.077.762	31,15	Turun
2005	10.074.514	1.326.761	15,17	Turun
2006	11.763.535	1.689.021	16,77	Naik
2007	13.047.527	1.283.992	10,92	Turun
2008	16.429.069	3.381.542	25,92	Naik

Sumber: Laporan Keuangan PT .Bank Jabar Banten

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kredit yang diberikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 merupakan jumlah kredit tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat menunjukkan kinerja bank

dalam mengelola dana yang ada telah optimal, dengan meningkatkan jumlah pemberian kredit kepada masyarakat.

Maka untuk mengetahui sejauh mana hubungan tingkat likuiditas bank dengan kemampuan bank untuk memberikan kredit, maka penulis tertarik untuk mengemukakan judul, **“Hubungan Tingkat Likuiditas Bank Dengan Pemberian Kredit pada PT. Bank Jabar Banten”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat likuiditas pada PT. Bank Jabar Banten.
2. Bagaimana perkembangan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Jabar Banten.
3. Bagaimana hubungan antara tingkat likuiditas bank dengan pemberian kredit di PT. Bank Jabar Banten.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana hubungan antara tingkat likuiditas bank dengan pemberian kredit.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas PT. Bank Jabar Banten dilihat dari hasil analisis laporan keuangan.



2. Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Jabar Banten.
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara tingkat likuiditas bank dengan pemberian kredit.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkannya. Kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Manajemen Perbankan dan Akuntansi Perbankan, khususnya yang berkaitan dengan topik likuiditas bank dan pengelolaan kredit.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan referensi bagi bank dalam mengelola tingkat likuiditas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank dalam mengelola dana yang ada salah satu caranya dengan pemberian kredit.